

**MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK**

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh : Kelompok 7

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Dia Ravikasari | 2313031067 |
| 2. Dela Zulia Pratiwi | 2313031079 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”** tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd. M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Di samping itu, apabila dalam makalah ini didapati kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam proses pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2025

Kelompok 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	3
B. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik	4
C. Indikator dan Metode Pengukuran Kinerja Sektor Publik	5
D. Tantangan dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik	8
BAB III PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11
STUDI KASUS	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting mengingat peran strategis organisasi publik dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor publik, keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek finansial, melainkan juga dari capaian sosial, kualitas layanan, dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Karakteristik unik sektor publik yang berorientasi pada pelayanan, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas kepada publik menuntut penerapan pengukuran kinerja yang komprehensif dan relevan dengan nilai-nilai sosial tersebut (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran kinerja menjadi alat evaluasi yang tidak hanya menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diharapkan dari penyelenggaraan pelayanan publik (Robinson & Last, 2017). Selain itu, pengukuran kinerja memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung pembelajaran organisasi untuk peningkatan kualitas dan inovasi yang berkelanjutan (Sari, 2020).

Namun demikian, pengukuran kinerja di sektor publik menghadapi beragam tantangan. Tantangan-tantangan ini menuntut pengembangan indikator dan metode pengukuran yang tepat serta peningkatan transparansi dan integritas pelaporan agar pengukuran kinerja dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan organisasi publik yang profesional dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang tersebut, pengukuran kinerja sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi publik mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat secara optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian pengukuran kinerja sektor publik?
2. Apa tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik?
3. Apa saja indikator dan metode dalam pengukuran kinerja sektor publik?
4. Apa saja tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian pengukuran kinerja sektor publik.
2. Mengetahui tujuan pengukuran kinerja sektor publik.
3. Mengetahui indikator dan metode dalam pengukuran kinerja sektor publik.
4. Mengetahui tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja di sektor publik merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana suatu organisasi publik berhasil mencapai tujuan dan memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Pengukuran ini tidak hanya fokus pada hasil finansial, tetapi juga pada capaian sosial, kualitas layanan, serta tingkat kepuasan publik. Menurut Mardiasmo (2018), sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengukuran kinerjanya harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebermanfaatan publik, bukan semata-mata keuntungan finansial. Oleh karena itu, pengukuran kinerja sektor publik harus mempertimbangkan karakteristik unik sektor ini yang meliputi orientasi pelayanan, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas kepada publik.

Robinson & Last (2017) dalam jurnal Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik menyatakan bahwa pengukuran kinerja publik mencakup indikator-indikator yang dapat mengukur efektivitas, efisiensi, ekonomi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menuntut penggunaan berbagai metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif, seperti balanced scorecard sektor publik yang mengintegrasikan perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Lebih lanjut, menurut Sari (2020) dalam buku Manajemen Kinerja Organisasi Publik, tujuan utama pengukuran kinerja adalah memberikan informasi relevan kepada pengambil keputusan dan publik mengenai capaian program, sekaligus menjadi alat pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan kata lain, pengukuran ini mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik.

Dengan demikian, pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu proses sistematis yang menggunakan indikator dan metode tertentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dengan mempertimbangkan nilai sosial, ekonomi, dan politik yang melekat di dalamnya.

B. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses evaluasi yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana suatu organisasi publik berhasil mencapai tujuan dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2015), tujuan utama dari pengukuran kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu organisasi publik berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengukuran ini, organisasi dapat mengidentifikasi sejauh mana capaian kinerja memenuhi target yang ditentukan, dan juga area-area yang masih perlu perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat pembelajaran bagi pegawai dan manajemen organisasi. Informasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk memahami bagaimana seharusnya pegawai bertindak, mengubah sikap, perilaku, dan meningkatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sehingga proses pengukuran ini mendukung pengembangan kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik.

3. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya

Pengukuran kinerja tidak hanya berakhir pada evaluasi hasil saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil pengukuran kinerja periode sekarang digunakan sebagai acuan untuk merancang perbaikan dan inovasi pada pelayanan atau operasi yang berkaitan, sehingga organisasi sektor publik bisa terus berkembang dan memberikan layanan yang semakin baik bagi masyarakat.

Selain dari ketiga tujuan utama tersebut, Mahmudi (2015) juga menekankan bahwa pengukuran kinerja membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat dan komprehensif. Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik memperkuat

akuntabilitas organisasi kepada publik dan stakeholder, sehingga transparansi kinerja dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi instrumen strategis dalam mengelola organisasi sektor publik secara profesional dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

C. Indikator dan Metode Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik memerlukan penggunaan indikator dan alat ukur yang tepat agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian tujuan organisasi publik sekaligus memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2015), indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi publik dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

1. Indikator Kinerja Sektor Publik

a. Indikator Kuantitatif dan Kualitatif

- Indikator kuantitatif biasanya berupa angka yang dapat dihitung, seperti jumlah layanan yang diselesaikan, waktu penyelesaian, tingkat kehadiran pegawai, dan lain-lain.
- Indikator kualitatif lebih menilai aspek-aspek seperti kualitas layanan, tingkat kepuasan masyarakat, kepatuhan, dan inovasi.

b. Indikator *Input, Process, Output, dan Outcome*

- *Input*, mencakup sumber daya yang digunakan, misalnya dana, tenaga kerja, fasilitas.
- *Process*, yaitu proses pelaksanaan kegiatan, misalnya kecepatan pelayanan, kepatuhan prosedur.
- *Output*, yaitu produk langsung dari kegiatan, misalnya jumlah warga yang menerima layanan.
- *Outcome*, yaitu dampak jangka panjang dari pelayanan terhadap

masyarakat, misalnya peningkatan kesejahteraan.

c. *Key Performance Indicators (KPI)*

KPI merupakan indikator kunci yang dijadikan fokus utama untuk mencerminkan keberhasilan strategis organisasi.

2. Metode Pengukuran Kinerja di Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan aspek esensial dalam memastikan jasa yang diberikan kepada masyarakat mencapai standar yang diinginkan secara efektif dan efisien. Berbagai pendekatan metode pengukuran telah dikembangkan untuk mengakomodasi karakteristik unik sektor publik, antara lain *Value for Money* (VfM), *Balanced Scorecard* (BSC), *Performance Budgeting*, dan *Benchmarking*. Berikut ini metode pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2015).

a. *Value for Money (VfM)*

Value for Money adalah pendekatan pengukuran kinerja yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya publik. Tujuan utama VfM adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh organisasi publik memberikan nilai maksimal bagi masyarakat. Menurut Mahmudi (2015), VfM menilai apakah sumber daya yang digunakan telah dioptimalkan untuk menghasilkan output dan outcome yang optimal, dengan mempertimbangkan kualitas, biaya, dan dampak layanan.

Dalam konteks sektor publik, pengukuran VfM melibatkan evaluasi tiga komponen utama:

- *Economy*, yaitu dengan meminimalkan biaya perolehan sumber daya.
- *Efficiency*, yaitu dengan melakukan perbandingan input dengan output yang dihasilkan.
- *Effectiveness*, yaitu pencapaian tujuan dan hasil/ outcome program. Pendekatan ini penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

b. *Balanced Scorecard (BSC)*

Balanced Scorecard adalah alat manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari beberapa perspektif secara seimbang. Mahmudi (2015) menguraikan empat perspektif utama BSC yang relevan di sektor publik, yaitu:

- Perspektif keuangan, seperti pengelolaan anggaran dan efisiensi biaya.
- Perspektif pelanggan/masyarakat, yaitu dengan mengukur kepuasan dan aksesibilitas layanan publik.
- Perspektif proses internal, fokus pada kualitas dan kecepatan proses pelayanan.
- Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi.

Dengan menggunakan BSC, organisasi publik dapat memantau kinerja secara holistik dan memastikan bahwa tujuan strategis diintegrasikan ke dalam aktivitas operasional.

c. *Performance Budgeting*

Performance Budgeting atau penganggaran berorientasi kinerja merupakan metode yang menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil kinerja yang diharapkan. Pendekatan ini menuntut adanya indikator kinerja yang jelas sehingga dana publik digunakan secara transparan dan berdasar hasil yang terukur. *Performance Budgeting* mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dengan menetapkan prioritas anggaran yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat. Metode ini mempermudah evaluasi program, meminimalisir pemborosan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pelayanan publik.

d. *Benchmarking*

Benchmarking adalah proses perbandingan kinerja dengan organisasi lain yang dianggap terbaik. *Benchmark* membantu organisasi publik mengenali kekuatan dan kelemahan relatifnya serta peluang perbaikan. Proses *benchmarking* meliputi pemilihan area kinerja yang akan

dibandingkan, pengumpulan data, analisis perbandingan, dan implementasi praktik terbaik yang ditemukan.

Pemilihan indikator dan metode harus disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan organisasi publik, agar hasil pengukuran dapat diandalkan dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, indikator yang dipilih harus mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

D. Tantangan dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, baik dari segi teknis maupun konteks sosial-politik. Tantangan-tantangan ini memengaruhi akurasi, relevansi, dan penerimaan hasil pengukuran kinerja, sehingga membutuhkan strategi yang matang untuk mengatasinya. Mahmudi (2015), menjelaskan tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik, antara lain sebagai berikut.

1. Sulitnya pengukuran *outcome* dan dampak jangka panjang

Berbeda dengan sektor swasta yang lebih mudah mengukur keuntungan, sektor publik menghadapi kesulitan mengukur dampak jangka panjang (*outcome*) dari program dan layanan. *Outcome* sering bersifat abstrak, terpengaruh banyak faktor eksternal, dan memerlukan waktu lama untuk dapat diukur secara valid.

2. Keterbatasan data dan informasi

Pengumpulan data yang akurat dan lengkap di sektor publik sering terkendala oleh keterbatasan sistem informasi dan sumber daya. Data yang tidak lengkap atau tidak terbaru dapat menyebabkan hasil pengukuran kurang akurat dan sulit dipakai sebagai bahan evaluasi atau pengambilan keputusan.

3. Resistensi dan tekanan politik

Pengukuran kinerja di sektor publik tidak terlepas dari intervensi politik yang dapat memengaruhi objektivitas dan transparansi hasil pengukuran. Tekanan agar kinerja terlihat baik demi kepentingan politik dapat

menyebabkan manipulasi data atau pelaporan kinerja yang tidak jujur.

4. Kurangnya pemahaman dan kapasitas SDM

Keterbatasan kemampuan teknis SDM dalam memahami dan mengelola sistem pengukuran kinerja juga menjadi kendala. Hal ini berpengaruh pada desain indikator, pengumpulan data, dan analisis hasil yang optimal.

5. Pengukuran yang berorientasi pada proses daripada hasil

Seringkali pengukuran kinerja hanya menilai proses administrasi atau aktivitas, bukan hasil atau dampak yang sebenarnya, sehingga mengaburkan fokus perbaikan kinerja yang seharusnya. Pendekatan ini dapat mengurangi efektivitas evaluasi (Mahmudi, 2015).

Tantangan besar dalam pengukuran kinerja sektor publik terletak pada keterbatasan data, faktor politik, dan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, pengembangan indikator yang tepat, peningkatan kapasitas SDM, serta transparansi dan integritas pelaporan menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan akuntabel.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting dan strategis untuk menilai keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada nilai sosial serta kesejahteraan masyarakat. Proses ini tidak hanya mengandalkan tolok ukur finansial, melainkan juga indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome, serta menggunakan metode seperti Value for Money, Balanced Scorecard, Performance Budgeting, dan Benchmarking. Tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Meskipun demikian, pengukuran kinerja sektor publik menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti kesulitan mengukur dampak jangka panjang, keterbatasan data, tekanan politik, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, yang memerlukan pendekatan yang matang dan transparan. Oleh karena itu, pengembangan indikator yang tepat, peningkatan kapasitas SDM, serta integritas pelaporan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengukuran kinerja yang akuntabel dan efektif demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

B. Saran

Demikian pokok bahasa yang dapat penulis paparkan. Makalah ini masih memiliki kekurangan baik dalam penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan makalah ini ke depannya agar lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Robinson, M., & Last, D. (2017). *Measuring Public Performance: International Trends and Challenges* dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 112–130.
- Sari, R. P. (2020). *Manajemen Kinerja Organisasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

STUDI KASUS

Pembangunan Jalan dan Drainase di Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 melaksanakan proyek besar untuk memperbaiki jalan rusak dan sistem drainase di beberapa wilayah kota. Drainase adalah saluran air yang berfungsi mengalirkan air hujan atau air limbah agar tidak menggenang dan menyebabkan banjir, terutama di daerah padat penduduk seperti Tanjungkarang dan Kedaton.

Tujuan proyek ini adalah untuk memperlancar transportasi, mengurangi banjir saat musim hujan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Namun, beberapa bulan setelah proyek selesai, muncul banyak keluhan dari warga karena jalan yang baru diperbaiki cepat rusak dan saluran drainase tersumbat, sehingga air masih sering meluap ke jalan. Keluhan ini viral di media sosial dan membuat masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proyek pembangunan.

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara pemerintah Kota Bandar Lampung mengukur kinerja proyek pembangunan agar sesuai dengan prinsip *Value for Money* (ekonomis, efisien, dan efektif)?
2. Bagaimana indikator pengukuran kinerja sektor publik seperti *input*, proses, *output*, dan *outcome* dapat menunjukkan manfaat proyek bagi masyarakat?